

Meninjau Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pendekatan Kapabilitas

Pinurba Parama Pratiyudha*

pinurba.parama.p@mail.ugm.ac.id

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari diskursus paradigma pembangunan sosial terutama di negara dunia ketiga. Diskursus pertama ialah mengulas pada kritik atas keberperanan negara yang luas dalam pembangunan sosial. Hal ini membawa pada munculnya penguatan peran aktor non-negara dalam pembangunan salah satunya melalui tanggungjawab sosial perusahaan yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Diskursus kedua berangkat dari pembangunan ekonomi yang melemahkan kapabilitas individu dalam mencapai kesejahteraan sebagai hasil pembangunan. Berdasarkan pendekatan kapabilitas dalam pembangunan manusia, penulis bertujuan menganalisis keberperanan kegiatan CSR dalam mendukung kapabilitas masyarakat melalui program Desa Mandiri Energi oleh PJB UP Paiton. Tulisan ini berargumen bahwa keberadaan CSR memberi kontribusi besar dalam memperkuat kapabilitas masyarakat yang sudah berkembang sedari dulu. Namun pada temuan selanjutnya terdapat beberapa aspek dalam program CSR yang masih perlu dikembangkan dan diperbaiki untuk mewujudkan kapabilitas manusia yang utuh.

Kata kunci: *corporate social responsibility, pendekatan kapabilitas, pemberdayaan masyarakat.*

Abstract

This paper departs from the discourse of the paradigm of social development in third world countries. The first discourse reviews the critics of the broad state in social development. It supports the non-state actors to take a part in development through corporate social responsibility (CSR). The second discourse departs from economic development which weakens the capability of the individual in achieving development itself. The concept of the capability approach in human development emerged as a solution to create inclusive welfare. This paper itself raises these two things in one discussion related to the role of CSR in relation to the development of human capabilities. Taking an analysis of the Program Desa Mandiri Energi by PJB UP Paiton, the study examines the role of CSR activities in supporting community capabilities. This paper argues that the existence of CSR provides a strong contribution to strengthening the capabilities of the community that has developed from the past. However, in the subsequent findings, there are several aspects of CSR programs that still several actions to be developed and improved human capabilities.

Keyword: *corporate social responsibility, capability approach, community empowerment.*

Pendahuluan

Keberperanan yang kuat negara sangat ditentukan oleh oleh manajemen atas kerja yang melibatkan banyak sektor. Pengambil kebijakan harus mampu membentuk kebijakan publik yang bersinkronasi satu sama lain; mengatur pertanian yang bersamaan pula dengan pengaturan impor-ekspor, penerapan pajak, subsidi fiskal, dan masih banyak lagi. Pada aspek kesejahteraan peran besar negara ini tidak akan berjalan maksimal ketika tidak adanya kepercayaan yang kuat antara masyarakat dengan negara. Kepercayaan yang kuat antara masyarakat dengan negara menjadikan kapabilitas negara dapat meluas dan merengkuh berbagai aspek kewarganegaraan (Hooghe & Marien, 2013; Pritchett, Woolcock, & Andrews, 2013). Secara teoritis kemudian diperlukan kondisi birokrasi yang efisien dengan rendahnya angka korupsi (Quah, 2013), serta transparansi pelaksanaan kebijakan (Rothstein, 2011). Melalui proses itulah kemudian negara – sebagai

* Corresponding Author: Pinurba Parama Pratiyudha. Lt.3 Gedung BC FISIPOL UGM, Jl. Sosio Yustisia No. 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

pemimpin dari pembangunan – mampu menghadirkan risiko ketimpangan yang kecil (Bergh & Bjørnskov, 2013; Bjørnskov & Svendsen, 2012).

Akan tetapi pada kenyataannya praktik ini tidak seutuhnya dapat dilakukan semua pemerintahan. Peran negara yang besar dalam kesejahteraan dikritik oleh Amartya Sen, dengan melihat dampak dari pembangunan berbasis sentralistik dan kapitalisme. Mengaca pada permasalahan kelaparan yang sering terjadi di Negara Belahan Selatan, Sen melihat kegagalan dari pembangunan ialah ketika negara gagal mengatasi permasalahan ketimpangan. Fokus sentralistik negara yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama dari munculnya ketimpangan (Iing, 2019; Sen, 1992, 2000). Hal ini kemudian menuntut pada pembangunan yang membebaskan melalui penguatan peran masyarakat.

Sebelum Orde Baru lengser, peran pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan hampir melingkupi segala aspek kehidupan. ‘Seragamisasi’ masyarakat, pembangunan *top-down*, dan komando yang tersentral selalu menjadi kritik utama dari gaya pembangunan Orde Baru (Soetomo, 2011; Sutoro, 2013). Bahkan paska Orde Baru lengser, bentuk sentralistik dari Orde Baru masih terasa dalam logika pembangunan saat ini (Sukma, 2011; Warburton, 2016). Hal ini menjadi sebuah anomali dari reformasi yang membawa semangat demokrasi dan *good governance* yang kuat. Partisipasi yang seharusnya menjadi alat utama dari program pembangunan masyarakat, justru akhirnya hanya menjadi bentuk mobilisasi masyarakat dan penyeragaman yang tidak nampak (Infid, 2010; Jones, 2017). Walaupun pembangunan kolaboratif berbasis *governance* menjadi salah satu semangat pemerintah paska Orde Baru, pada kenyataannya kemudian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Memasuki era neoliberalisme pembangunan, peran negara mulai terbatas dengan momentum masuknya privatisasi dan perspektif New Public Management (NPM) melalui konsepsi *governance* (Kajimbwa, 2013). Negara memasuki perannya yang mendekati kerja sebuah korporasi dan memulai kerja sama dengan sektor privat dalam urusan pertumbuhan dan pembangunan (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011; Moratis, 2016). Berangkat dari titik ini kemudian muncul bagaimana keberperanan kesejahteraan menjadi hal yang plural. Setiap aktor yang ada dapat melakukan praktek kesejahteraan baik secara individu maupun bermitra satu sama lain. Munculnya peran kesejahteraan yang plural tidak lepas dari penjelasan di awal ketika negara belum maksimal dalam menyediakan kesejahteraan. Tidak maksimalnya peran negara membawa pada peran kesejahteraan yang melibatkan peran sektor privat dan civil society (Yuda, 2016).

Keberperanan sektor privat dijawantahkan dalam konsep *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP). Bentuk penerapan CSR dalam pembangunan merupakan sebuah inisiasi yang sebenarnya menarik untuk ditelisik terutama dalam penerapan pluralisme kesejahteraan. Pada sisi lain konteks CSR menjadi wujud secara tak langsung dari penerapan pemerintahan melalui konsepsi *governance*. Sehingga kemudian dalam praktek kerja CSR didorong pada keterlibatannya dalam kemitraan baik dengan pemerintah maupun masyarakat sebagai target langsung (Scandellius & Cohen, 2016; Westermann-Behaylo, Van Buren, & Berman, 2016).

Tulisan ini mengambil kasus pemberdayaan masyarakat CSR Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit (PJB UP) Paiton di Desa Andung Biru melalui program Desa Mandiri Energi. CSR PJB UP Paiton merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang sudah mendapatkan predikat emas dalam penghargaan Proper 2017 dan 2018. Dengan mengangkat pendekatan kapabilitas sebagai

alternatif dari pembangunan, tulisan ini membawa rumusan penelitian yaitu melihat konteks kapabilitas sebagai wujud dari kegiatan CSR. Penghubungan antara praktek CSR dengan penguatan kapabilitas berdasar pada arus utama pembangunan saat ini yang mengarah pada pemberdayaan kapasitas masyarakat (Sexsmith & McMichael, 2015). Mengambil konteks empiris tersebut tulisan ini berargumen bahwa keberadaan CSR PJB UP Paiton turut mendorong pada penguatan kapabilitas yang sedari awal sudah siap mandiri terutama dalam penguatan kelompok masyarakat di Desa Andung Biru. Akan tetapi tulisan ini pula tidak menutup pada belum efisiennya usaha pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kapabilitas yang kuat. Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam mewujudkan program CSR yang mampu menciptakan kapabilitas yang baik dan efisien.

Pendekatan Kapabilitas

Pendekatan kapabilitas hadir sebagai bentuk pendekatan yang mengedepankan pada kebebasan manusia dalam meraih kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Manusia dibentuk sebagai entitas yang harus memiliki akses yang luas dan efektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan berkehidupan (Robeyns, 2016a, 2016b; Sen, 2009). Sementara itu secara independen Martha Nussbaum (2011b) mendeskripsikan pendekatan kapabilitas terdiri atas dua bagian. Pertama ialah yang konsen pada perbandingan kualitas berkehidupan dan yang kedua berkaitan pada konseptualisasi keadilan.

Pendekatan kapabilitas memiliki dua ide dasar dalam melihat manusia sebagai entitas yang bebas dalam mengembangkan kapabilitas. Pertama, keberfungsian sebagai segala bentuk keberadaan manusia dan aktivitasnya (*beings and doings*) (Bailliard, 2014; Robeyns, 2013; Sen, 1992). Kedua bentuk tersebut merupakan deskripsi yang pada dasarnya dapat saling berelasi ataupun dimiliki secara bersamaan oleh satu konteks kehidupan (Robeyns, 2016b). Kedua, kapabilitas sebagai kombinasi alternatif dari keberfungsian yang di mana perlu seseorang untuk mendapatkannya. Keberfungsian berorientasi pada realitas dan keberhasilan, sementara kapabilitas menyangkut bentuk efisien bagi manusia dalam meraih kebebasan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas mereka (Robeyns, 2016b, 2017).

Keberadaan pendekatan kapabilitas memberi perspektif baru dalam proses pembangunan masyarakat. Konteks pembangunan dimunculkan bukan lagi pada tataran pertumbuhan ekonomi, namun pada perlindungan dan penyediaan ruang hak dasar manusia (Nussbaum, 2011a; Sen, 2000). Pendekatan kapabilitas mengutamakan hak dasar yang berfokus pada kebebasan manusia dalam pengembangan kapabilitasnya (Dean, 2015; Murphy, 2014; Sen, 2003). Narasi pemabangunan kemudian bertujuan dalam penyediaan akses yang baik atas ruang berkembang serta akses kesempatan kesejahteraan. Pendekatan kapabilitas mengedepankan kemanusiaan sebagai hal utama yang perlu dikedepankan dalam usaha-usaha pembangunan (Formosa & Mackenzie, 2014; Gluchman, 2019). Esensi pemenuhan hak kewarganegaraan menjadi tujuan utama yang perlu dipenuhi dalam proses pembangunan (Gough, 2013; Jacott & Maldonado, 2012; Stokke, 2017).

Tulisan ini mengkontekstualisasikan pendekatakan kapabilitas dalam peran *corporate social responsibility* (CSR) untuk pengembangan masyarakat. CSR secara umum merupakan keberperanan intervensi kesejahteraan yang dilakukan oleh aktor privat sebagai wujud pluralisme kesejahteraan. Keberadaan pluralisme kesejahteraan merupakan konsep peran pembangunan melalui pemenuhan hak-hak kesejahteraan oleh aktor di luar negara (Chaney & Wincott, 2014; Moreno, 2010; Westermann-Behaylo et al., 2016). Kesejahteraan tidaklah kemudian menjadi monopoli negara,

namun juga aktor stakeholder kesejahteraan, privat dan kelompok masyarakat (Sumarto, 2017; Yuda, 2016).

Melihat dalam bentuk pluralisme dalam kesejahteraan, keberadaan praktek CSR sudah memiliki keterhubungan dengan pendekatan kapabilitas. Nussbaum (2004) berpendapat bentuk peran tanggung jawab perusahaan sangat berelasi dengan aspek pendidikan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan kapabilitas, sektor privat mampu untuk berperan dan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok marjinal (Shivarajan & Srinivasan, 2013). (Ndajiya, 2017; Retamal & Dario, 2017; Shivarajan & Srinivasan, 2013). Sementara pendapat lain juga melihat praktek CSR yang menggunakan pendekatan kapabilitas memiliki keterkaitan dengan semangat etika bisnis (Milar & Koning, 2018) dengan mengedepankan hak manusia untuk tumbuh dan berkembang (Tiller, 2017). Praktek CSR dalam kacamata pendekatan kapabilitas berperan dalam memperkuat kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan (Schölmerich, 2013).

Berangkat dari penelaahan literatur yang telah dipaparkan, diskusi pendekatan kapabilitas difokuskan pada keberfungsian dalam program Desa Mandiri Energi CSR PJB UP Paiton. Keberfungsian dijelaskan dalam konteks yang naratif dengan melihat dinamika masyarakat dan intervensi CSR. Penengahan konteks dinamika masyarakat ini dilakukan dengan menghadirkan bentuk-bentuk keberfungsian yang sudah mapan sedari awal. Sehingga didapat pula gambaran kesempatan masyarakat yang luas dalam menciptakan kondisi sejahtera secara mandiri. Sementara itu bentuk keberfungsian juga dibahas dalam konteks intervensi CSR di dalam kesejahteraan masyarakat. Intervensi ini dilihat melalui bentuk keberfungsian yang dihadirkan oleh program CSR kepada masyarakat. Pada sisi lain, tulisan ini membuka pembahasan pada bentuk ekspansi dari keberfungsian yang dilakukan dalam program CSR. Dengan mengangkat bentuk keberfungsian ini, maka didapat gambaran aktivitas-aktivitas nyata dalam proses pemberdayaan program Desa Mandiri Energi

Metode Penelitian

Penelitian dengan berbasis paradigma berpikir pendekatan kapabilitas pada hakikatnya tidak memiliki batasan metode yang digunakan. Pendekatan kapabilitas dapat dijelaskan menggunakan metode yang berbasis positivistik ataupun perspektif-perspektif yang bersifat kualitatif (Robeyns, 2016b; Sen, 2000). Sehingga kemudian dapat dijelaskan bahwa pendekatan kapabilitas cenderung bersifat lentur dalam praktik studi ilmiah dengan menyeduaikan kondisi empiris. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini mengadopsi sifat penelitian kualitatif dengan secara spesifik merujuk pada studi kasus (Yazan, 2015; Yin, 2009).

Pengadopsian studi kasus didasari pada fokus penelitian yang mendalam pada fakta-fakta lapangan dengan berbasis pendekatan kapabilitas. Penelitian ini mengkaji kapabilitas dari kasus program CSR PJB UP Paiton di dalam program Desa Mandiri Energi dengan berfokus pada dua program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tirta Pijar dan pemberdayaan organisasi BUMDes Bumi Renggani Desa Andung Biru Probolinggo. Fokus kasus lebih banyak membahas pada PLTMH Tirta Pijar mengingat keberadaan program ini sudah lebih dahulu ada. Sementara itu pemberdayaan BUMDes Bumi Renggani baru di mulai pada awal 2019.

Pengambilan data digunakan proses wawancara mendalam dan observasi partisipan. Pada proses wawancara mendalam penelitian ini telah mewawancarai aktor sentral berjumlah 24 orang. Narasumber berasal dari Kelompok PLTMH Tirta Pijar sejumlah 8 orang, Bumdes Bumi

Rengganis 7 orang, Perangkat Desa Andung Biru 5 orang, PJB UP Paiton 2 orang, dan BLK Probolinggo sejumlah 2 orang yang diberikan kode tertentu dalam publikasi ini. Untuk observasi partisipan penelitian ini secara teknis melakukan kegiatan *live in* selama bulan Agustus 2019 di Desa Andung Biru, Probolinggo. Penelitian dilakukan dengan melihat aktivitas kelompok Tirta Pijar dalam mengelola pembangkit listrik, kegiatan organisasi BUMDes Bumi Rengganis, serta kehidupan masyarakat Desa Andung Biru secara menyeluruh.

Penelitian ini mengadopsi proses analisis yang bersifat tematik. Analisis tematik secara umum berbasis pada proses analisis data yang terkumpul melalui pembangunan tema yang didapat dari kerangka teori dan konstruksi empiris (Braun & Clarke, 2014; Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013). Dalam proses penentuan tema, penelitian ini melakukan kajian literatur dengan mengambil pembahasan keberfungsian dalam pendekatan kapabilitas. Dari tema keberfungsian ini penulis membangun indeks yang berkaitan dengan keberfungsian dalam pendekatan kapabilitas. Pembangunan indeks ini penulis lakukan secara induktif dengan melihat konteks lapangan. Setidaknya dibangun dua indeks berdasarkan konteks organisasi penerima manfaat (PLTMH Tirta Pijar dan BUMDes Bumi Rengganis). Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pelabelan data sekaligus dengan klasifikasi berdasarkan tema. Melalui data yang telah diklasifikasi kemudian disintesis dalam argumen utam, serta selanjutnya disusun dalam narasi hasil dan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat dan Program CSR PJB UP Paiton di Andung Biru

Keberadaan pemberdayaan masyarakat di Desa Andung Biru tidak dapat dilepas dari komunitas masyarakat Kelompok Tirta Pijar dan Lang Baling mereka. Kelompok Tirta Pijar adalah sebuah komunitas masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat berbasis energi terbarukan yaitu energi *mikrohidro*. Sementara itu Lang Baling merupakan idiom dalam bahasa Madura dalam menyebut baling-baling air dari kayu. Sebagai desa di Kabupaten Probolinggo yang berposisi paling ujung selatan dan berada di kaki gunung Argopuro, beberapa dusun di Desa Andung Biru masih belum terjangkau aliran listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) hingga sekarang. Adalah Muhammad Rasid, warga desa Desa Andung Biru, yang kemudian melihat permasalahan ini perlu diatasi secara mandiri. Terinspirasi dengan turbin mikrohidro salah satu pabrik teh di Jember, Muhammad Rasid secara swadaya bersama beberapa warga menciptakan turbin mikrohidro. Masyarakat memanfaatkan salah satu aliran sungai yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka sebagai pembangkit daya. Pada kala itu turbin masihlah sangat sederhana karena menggunakan bahan baku kayu, sehingga kemudian disebut sebagai Lang Baling (ES, 2019; RA, 2019; TO, 2019).

Lambat laun secara swadaya masyarakat melalui Kelompok Tirta Pijar mulai mengembangkan turbin mikrohidro dan instalasi listrik menuju rumah warga. Memasuki tahun 2000 kelompok Tirta Pijar mampu memiliki turbin mesin dengan daya distribusi listrik besar. Dalam proses pengadaan ini, komunitas Tirta Pijar melakukan pembelian *spare parts* secara terpisah dan merakitnya secara swadaya. Pada kala itu listrik yang dihasilkan mampu mengaliri listrik hampir satu dusun. Kemudian pada tahun 2004, keberadaan inisiasi penyediaan listrik secara swadaya menarik beberapa akademisi teknik yang kemudian membawa hadirnya intervensi privat ke Desa Andung Biru. Intervensi pertama ialah oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) pada tahun 2008. PGN

bersamaan pada tahun 2018 juga diniasi pelatihan terkait pengolahan biji kopi serta demplot kebun kopi organik. Dipilihnya tanaman kopi ialah mengingat kopi sebagai komoditas ekonomi utama di Desa Andung Biru.

Tabel 1. Kegiatan CSR PJB UP Paiton dalam Program Desa Mandiri Energi

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Bantuan pipa	Meningkatkan kualitas saluran air ke PLTMH
2	Bantuan turbin	Peningkatan kapasitas pasokan listrik
3	Bantuan alat olah kopi	Pemberian alat pengolahan kopi kepada kelompok Tirta Pijar yang sebagian besar anggota adalah petani kopi.
4	Workshop produksi kopi	Pelatihan kepada kelompok Tirta Pijar mengenai teknik <i>roasting</i> biji kopi.
5	Bantuan Kandang Sapi dan Bank Bibit	Bantuan fasilitas pemberdayaan kepada Kelompok BUMDes Bumi Rengganis
6	Studi banding pengolahan kopi	Diikuti BUMDes Bumi Rengganis dan Kelompok Tirta Pijar dengan pengajaran budidaya dan pengolahan kopi.
7	Pelatihan budidaya kopi	Memberikan pengetahuan mengenai cara budidaya kopi ramah lingkungan.
8	Pelatihan pembibitan	Ditujukan kepada anggota BUMDes Bumi Rengganis mengenai pelatihan teknik pembibitan tanaman ekonomis.
9	Studi banding ternak sapi	Dikhususkan kepada Kelompok BUMDes Bumi Rengganis mengenai proses penggemukan sapi yang efisien dan ramah lingkungan.
10	Pelatihan pembuatan pakan ternak.	Ditujukan kepada anggota Kelompok BUMDes Bumi Rengganis untuk belajar mengolah pakan ternak dari bahan kulit kopi.
11	Pelatihan instalasi listrik dengan BLK Kab. Probolinggo	Kegiatan pelatihan kepada Pengurus PLTMH mengenai instalasi sederhana dengan aman dan baik.

Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan kegiatan yang berfokus pada BUMDes Bumi Rengganis melalui pelatihan pembibitan serta pengolahan pakan ternak. Hingga tulisan ini ditulis, pada tahun 2019 pula sedang dilaksanakan pengadaan kandang sapi komunal serta fasilitasi izin dan pelatihan instalasi listrik. Pada rencana kedepannya pada 2020, CSR PJB UP Paiton akan berfokus pada upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan biogas. Rencana jangka panjang inilah yang kemudian membentuk pola integrasi yang digambarkan pada skema 1.

Untuk melihat lebih jauh pada keberperanan CSR PJB UP Paiton dalam penguatan kapabilitas masyarakat penerima manfaat program Desa Mandiri Energi, perlulah terlebih dahulu didalami sejauh mana intervensi yang telah dilakukan. Berdasarkan pendalaman di lapangan, setidaknya terdapat 11 kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2019 (IW, 2019; NY, 2019; RA, 2019). Kegiatan ini secara umum meliputi pemberian bantuan sarana dan prasarana PLTMH, pengembangan dan pelatihan budidaya kopi, bantuan pelatihan pengembangan pembibitan dan pengelolaan ternak sapi, serta pelatihan dan sertifikasi instalasi listrik sederhana. Kegiatan-kegiatan tersebut diberikan secara khusus kepada anggota Kelompok Tirta Pijar dan BUMDes Bumi Rengganis yang dirinci pada tabel 1.

Berdasarkan deskripsi kegiatan-kegiatan tersebut, dapat dipahami maksud dari pendampingan CSR oleh PJB UP Paiton bertujuan pada integrasi program yang berbasis

lingkungan dan ekonomi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, hal ini diarahkan sebagai upaya menciptakan keberlanjutan ekosistem air sebagai sumber utama PLTMH (BT, 2019; ES, 2019; IW, 2019). Selain itu juga menanggapi kondisi Desa Andung Biru yang rawan bencana dan belum tersentuh program pemberdayaan secara masif.

Dampak Kegiatan CSR dalam Penguatan Kapabilitas Masyarakat

Mengacu pada bentuk kegiatan yang diberikan serta melihat lebih jauh dalam pendekatan kapabilitas, tulisan ini kemudian membagi analisis atas program menjadi dua bagian penjelasan. Penjelasan ini dibangun berdasarkan aktor-aktor yang terlibat di dalam masyarakat. Pembangian ini diperlukan oleh karena bentuk intervensi yang diberikan hampir sangat berbeda satu dengan lain, baik secara substansi maupun waktu. Pertama marilah menilik pada intervensi kepada kelompok Tirta Pijar. Hal pertama yang perlu didasari ialah, keberadaan kapabilitas dalam kelompok ini pada dasarnya sudah mapan sejak awal. Keberfungsian individu dan masyarakat dalam kelompok tersebut sudah ada, sebelum masuknya bantuan dari pihak eksternal. Keberfungsian ini diwujudkan pada bentuk skema pembayaran listrik masyarakat yang menggunakan sumberdaya lokal yang mereka miliki. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, masyarakat melakukan pembayaran secara tahunan dan sering pula membayarnya menggunakan hasil bumi (RA, 2019; SN, 2019). Skema pembayaran yang bersifat tahunan ini disesuaikan dengan masa panen kopi para petani.

Keberadaan keberfungsian di dalam kelompok Tirta Pijar merupakan wujud dari peran masyarakat untuk bergerak secara swadaya dalam menciptakan kapabilitas. Masyarakat mampu menggunakan konteks fungsi-fungsi yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi kapabilitas yang efektif dan memberi dampak secara ekonomi (Robeyns, 2016b, 2017). Realita empiris ini juga membawa pada argumen baru yang mengembangkan dari konteks kapabilitas yang diangkat oleh Amartya Sen. Pendekatan kapabilitas pada dasarnya berfokus pada peran pemerintah atau aktor kuasa dalam memberikan ruang atas terciptanya hak atas kapabilitas hidup (Dean, 2015; Sen, 2000). Namun kasus di Desa Andung Biru memberi sebuah gambaran bagaimana masyarakat justru mampu menciptakan ruang bagi dirinya sendiri untuk memiliki hak atas kapabilitas yang luas. Ditengah keterbatasan akses mereka mampu mengembangkan diri mereka sendiri. Hal inilah yang semakin menguatkan pula bentuk intervensi pembangunan yang diperlukan adalah pendampingan dan kemitraan, bukan lagi pada kebutuhan pembangunan dari tiada menjadi ada (Westermann-Behaylo et al., 2016).

Walaupun adanya keberfungsian yang sudah mapan dan berkembang menjadi kapabilitas dalam masyarakat, penulis menemukan bagaimana masih adanya beberapa catatan dalam skema kerja Kelompok Tirta Pijar. Pertama ialah berkaitan dengan aspek keselamatan kerja dan pengembangan daya listrik turbin. Berdasarkan penuturan anggota Kelompok Tirta Pijar, pola kerja yang dilakukan oleh masyarakat masih mengandalkan proses *trial and error* (AM, 2019; RA, 2019; TO, 2019). Sebagai contoh, masyarakat melakukan pembelajaran secara otodidak pada awal pemasangan dan perawatan jaringan listrik menuju rumah-rumah warga. Hal ini kemudian memberi celah pada aspek keamanan oleh karena beberapa kali anggota Kelompok Tirta Pijar mengalami kecelakaan kerja seperti tersetrum listrik. Selain itu proses belajar yang otodidak ini sempat berakibat pada perawatan turbin yang seadanya sehingga sempat membakar turbin. Kondisi inilah yang kemudian membutuhkan bentuk-bentuk penguatan kebebasan atas kapabilitas melalui

fasilitasi pendidikan (Milar & Koning, 2018; Schölmerich, 2013). Sehingga kemudian masyarakat memiliki ruang kesadaran yang luas untuk berkembang secara efisien dan sesuai dengan konteks kehidupan mereka.

Bentuk pendampingan CSR PJB UP Paiton kepada Kelompok Tirta Pijar secara umum mampu mendekati dengan baik pemenuhan pada konteks pendekatan kapabilitas. Dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Probolinggo memberi pengajaran pada instalasi listrik sederhana (EG, 2019; FU, 2019). Selain memberi peluang kerja yang luas melalui fasilitas sertifikasi, bentuk pelatihan ini memberi peluang masyarakat untuk mampu sadar terkait standar instalasi. Lebih jauh lagi pelatihan ini juga mencanangkan pada peningkatan kesadaran keselamatan kerja masyarakat yang ikut andil di PLTMH. Selain itu bentuk intervensi lain berupa pemberian turbin dan prasarana lain yang menunjang PLTMH semakin menguatkan keberfungsian masyarakat dalam Kelompok Tirta Pijar dalam menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik.

Selain berfokus pada PLTMH, CSR PJB UP Paiton juga berusaha pada pengembangan komoditas lokal Desa Andung Biru yaitu kopi dengan menggandeng Kelompok Tirta Pijar. Bentuk pelatihan terkait budidaya kopi dan bantuan alat olah kopi pada dasarnya sudah menjadi upaya dalam pengembangan kapabilitas masyarakat terkait pengolahan kopi. Hal ini sangatlah penting karena berdasarkan observasi dan wawancara singkat yang dilakukan penulis, rata-rata para petani kopi belum memahami proses pengolahan kopi yang benar dan menjual (LF, 2019; NY, 2019; RA, 2019; WJ, 2019). Petani masih sekedar memetik kopi yang dianggapnya sudah matang dan langsung memberikannya kepada tengkulak tanpa diproses secara serius. Proses yang sedang dilakukan dalam program CSR PJB UP Paiton pada dasarnya masih masuk pada permulaan, sehingga belum seluruh petani sadar untuk mengolah biji kopinya dengan lebih serius. Berdasarkan observasi lapangan, hanyalah Muhammad Rasid dan beberapa anggota Tirta Pijar yang sadar dan mampu mengembangkan pengolahan kopi yang lebih serius. Hal ini yang kemudian menjadi catatan kritis tentang masih adanya keberfungsian masyarakat yang belum tersentuh dan berkembang menjadi kapabilitas yang efektif.

Bentuk pengembangan kapabilitas yang kedua ialah dilihat kepada BUMDes Bumi Rengganis. Menurut hasil wawancara, BUMDes dibentuk berdasarkan kerjasama antara pemerintah desa Andung Biru dengan CSR PJB UP Paiton (BT, 2019; LF, 2019; NY, 2019; SU, 2019). Kerjasama ini adalah kelanjutan dari keberadaan Desa Andung Biru yang baru saja dua kali berturut-turut diterjang banjir dan tanah longsor. Sehingga kemudian diinisiasi BUMDes Bumi Rengganis yang dimana salah satunya berfokus pada pembibitan dalam rangka menangkal longsor dan banjir. Bentuk kerjasama ini kemudian menjadi gambaran bagaimana program CSR PJB UP Paiton sudah mengarah pada pengembangan kapabilitas yang menasar pada konteks lingkungan (Nussbaum, 1988, 2004). Selain itu proses pelaksanaannya juga menarget kepada kelompok anak muda sebagai anggota BUMDes. Kelompok muda di Desa Andung Biru pada dasarnya adalah kelompok yang termarginalkan secara ekonomi (Sen, 2000; Shivarajan & Srinivasan, 2013) karena hampir sebagian besar bekerja serabutan dan petani musiman. Keberadaan BUMDes Bumi Rengganis memberi ruang pada pengembangan potensi yang lebih luas.

Dalam usaha mencapai tujuan integrasi yang lebih luas, program kepada BUMDes Bumi Rengganis sudah dijalankan sejak akhir tahun 2018. Sehingga secara utuh kegiatan program kepada BUMDes Bumi Rengganis masih terbatas dan masuk pada tahap permulaan. Namun

pengembangan kapabilitas sudah dimulai melalui pelatihan terkait pembibitan dan peternakan. Ini menjadi bentuk representasi dari kepedulian perusahaan yang secara tidak sadar memiliki semangat yang sama dengan pendekatan kapabilitas. Akan tetapi dalam proses masalah menyisakan catatan. Kesadaran masyarakat terutama anggota BUMDes untuk berdaya belumlah mencapai titik yang kritis. Masyarakat masih cenderung melihat program CSR PJB UP Paiton sebagai satu-satunya jalan sejauh ini untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Sehingga kemudian menjadi bentuk kritik pula pada kebutuhan peningkatan kesadaran masyarakat terkait keberadaan mereka dalam pembangunan secara kritis.

Kesimpulan

Keterlibatan sektor privat dalam kesejahteraan pada dasarnya bukanlah hal yang baru. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu wujud bagaimana sektor privat mampu memberikan bentuk kesejahteraan melalui tanggung jawab bisnis mereka. Sehingga di sinilah peran kesejahteraan menjadi bentuk yang plural dan bekerja melalui bentuk kemitraan ataupun swadaya secara mandiri di antara pemangku yang ada. Kegiatan CSR PJB UP Paiton merupakan salah satu bentuk dari kegiatan CSR yang mampu berlangsung dengan baik. Penghargaan Proper Emas dari tahun 2017 hingga 2018 menjadi contoh bagaimana kinerja dan tata kelola CSR yang diberikan memenuhi standar yang sangat baik. Pada titik ini pula kemudian penelitian ini ingin melihat lebih jauh, sebaik apakah program CSR PJB UP Paiton melalui pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum.

Mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana proses penguatan kapabilitas masyarakat dalam program CSR PJB UP Paiton dalam program Desa Mandiri Energi, penulis menemukan berbagai fakta menarik. Pertama perlu dilihat keberperanan PJB UP Paiton mampu mengembangkan kapabilitas masyarakat yang sudah mapan. Kelompok Tirta Pijar merupakan kelompok yang berfokus pada pengembangan PLTMH secara swadaya serta sedari dulu memiliki keberfungsian yang telah berkembang menjadi kapabilitas. Intervensi dari kegiatan CSR PJB UP Paiton memberi modal baru bagi penguatan kapabilitas yang sudah ada. Sebagai contoh adalah bagaimana keberadaan pelatihan instalasi listrik memberi pemahaman baru kepada masyarakat supaya mampu memenuhi standar aman dalam instalasi listrik rumah. Lebih lanjut lagi, peran dari CSR mampu melangkah lebih jauh pada pengembangan sektor ekonomi melalui budidaya kopi. Walaupun proses penguatan ini baru berjalan selama setahun, namun potensi yang diberikan dapat berkembang di kedepannya.

Selain itu pengembangan kapabilitas pada BUMDes Bumi Rengganis menjadi wujud lain dari komitmen perusahaan. Untuk konteks kegiatan kepada BUMDes Bumi Rengganis pada dasarnya barulah berjalan setahun. Namun bentuk kegiatan sudah memasukan unsur-unsur pendekatan kapabilitas secara tidak langsung. Sehingga kemudian pada gambaran kedepannya dapat diperoleh potensi kapabilitas masyarakat yang kuat. Akan tetapi menjadi catatan pula akan bagaimana kesadaran masyarakat masalah belum masuk pada taraf kritis. Sehingga ada potensi negatif pada ketergantungan masyarakat atas program CSR dari PJB UP Paiton.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM serta PJB UP Paiton yang memberi akses dalam proses pengambilan data yang dilakukan.

Penulis juga berterima kasih kepada Ulul Azmi Aziz sebagai rekan dalam pengambilan data di Desa Andung Biru, Probolinggo.

Referensi

- Bailliard, A. (2014). Justice, Difference, and the Capability to Function. *Journal of Occupational Science*, 23(1), 1–16.
- Bergh, A., & Bjørnskov, C. (2013). *Trust, Welfare States and Income Equality: What Causes What?* (IFN Working Paper No. 994). Stockholm.
- Bjørnskov, C., & Svendsen, G. T. (2012). Does social trust determine the size of the welfare state? Evidence using historical identification. *Public Choice*, 157(1–2), 269–286.
- Braun, V., & Clarke, V. (2014). What can “thematic analysis” offer health and wellbeing researchers? *International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being*, 9, 26152.
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public-private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. *Public Administration and Development*, 31(1), 2–14.
- Chaney, P., & Wincott, D. (2014). Envisioning the Third Sector’s Welfare Role: Critical Discourse Analysis of ‘Post-Devolution’ Public Policy in the UK 1998–2012. *Social Policy and Administration*, 48(7), 757–781.
- Dean, H. (2015). *Social Right and Human Welfare*. London & New York: Routledge.
- Formosa, P., & Mackenzie, C. (2014). Nussbaum, Kant, and the Capabilities Approach to Dignity. *Ethical Theory and Moral Practice*, 17, 875–892.
- Gluchman, V. (2019). Human Dignity as the Essence of Nussbaum’s Ethics of Human Development. *Philosophia*, 47, 1127–1140.
- Gough, I. (2013). Social policy regimes in the developing world. *A Handbook of Comparative Social Policy*, 205–224. Diambil dari http://eprints.lse.ac.uk/51023/1/Gough_social_policy_regimes_2013.pdf
- Hooghe, M., & Marien, S. (2013). A Comparative Analysis of the Relation Between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe. *European Societies*, 15(1), 131–152.
- Ing, M. (2019). Freedom from Development. *Law and Development Review*, 12(2), 323–349.
- Infid. (2010). *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: Proyek Buta Tuli Terhadap Aspirasi Masyarakat Desa*.
- Jacott, L., & Maldonado, A. (2012). Social justice and citizenship education. In P. Cunningham & N. Fretwell (Ed.), *Creating Communities: Local, National and Global* (hal. 511–517). London: CiCe.
- Jones, P. (2017). Formalizing the Informal: Understanding the Position of Informal Settlements and Slums in Sustainable Urbanization Policies and Strategies in Bandung, Indonesia. *Sustainability*, 9(8), 1–27.
- Kajimbwa, M. (2013). New Public Management: A Tribute to Margaret Thatcher. *Public Policy and Administration Research*, 3(5), 64–69.
- Milar, J., & Koning, J. (2018). From Capacity to Capability? Rethinking the PRME agenda for inclusive development in management education. *African Journal of Business Ethics*, 12(1), 22–37.
- Moratis, L. (2016). Consequences of Collaborative Governance in CSR: An Empirical Illustration of Strategic Responses to Institutional Pluralism and Some Theoretical Implications. *Business and Society Review*, 121(3), 415–446.
- Moreno, L. (2010). Welfare mix, CSR and social citizenship. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 30(11/12), 683–696.
- Murphy, M. (2014). Self-determination as a Collective Capability: The Case of Indigenous Peoples. *Journal of Human Development and Capabilities*, 15(4), 320–334.

- Ndajiya, A. N. (2017). *Corporate social responsibility in multinational oil companies and the impact on sustainable development in the Niger Delta*. University of Bradford.
- Nussbaum, M. (2004). Beyond the social contract: Capabilities and global justice. *Oxford Development Studies*, 32(1), 3–18.
- Nussbaum, M. (2011a). Capabilities, Entitlements, Rights: Supplementation and Critique. *Journal of Human Development and Capabilities*, 12(1), 23–37.
- Nussbaum, M. (2011b). *Creating Capabilities*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2013). Looking Like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capability for Implementation. *The Journal of Development Studies*, 49(1), 1–18.
- Quah, J. S. T. (2013). Curbing Corruption in Singapore: The Importance of Political Will, Expertise, Enforcement, and Context. In J. S. T. Quah (Ed.), *Different Paths to Curbing Corruption (Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 23)* (hal. 137–166). Emerald Group Publishing Limited.
- Retamal, T., & Dario, L. (2017). *Corporate social responsibility (CSR) and development: the case of gender equality in Latin America*. University of Nottingham.
- Robeyns, I. (2013). Capability ethic. In H. LaFollette & I. Persso (Ed.), *The Blackwell Guide to Ethical Theory* (hal. 412–432). Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Robeyns, I. (2016a). Capabilitarianism. *Journal of Human Development and Capabilities*, 17(3), 397–414.
- Robeyns, I. (2016b). The Capability Approach. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Diambil dari <https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/>
- Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers.
- Rothstein, B. (2011). *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Scandellius, C., & Cohen, G. (2016). Achieving collaboration with diverse stakeholders—The role of strategic ambiguity in CSR communication. *Journal of Business Research*, 69(9), 3487–3499.
- Schölmerich, M. J. (2013). On the impact of corporate social responsibility on poverty in Cambodia in the light of Sen’s capability approach. *Asian Journal of Business Ethics*, 2(1), 1–33.
- Sen, A. (1992). *Inequality Re-examined*. Oxford: Clarendon Press.
- Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knoff.
- Sen, A. (2003). Development as Capability Expansion. In S. Fukuda-Parr (Ed.), *Reading in Human Development* (hal. 41–58). New Delhi & New York: Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. London: Allen Lane.
- Sexsmith, K., & McMichael, P. (2015). Formulating the SDGs: Reproducing or Reimagining State-Centered Development? *Globalizations*, 12(4), 581–596.
- Shivarajan, S., & Srinivasan, A. (2013). The poor as suppliers of intellectual property: A social network approach to sustainable poverty alleviation. *Business Ethics Quarterly*, 23(3), 381–406.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stokke, K. (2017). Politics of Citizenship: Toward an Analysis Framework. In E. Hiariej & K. Stokke (Ed.), *Politics of Citizenship in Indonesia* (hal. 23–54). Jakarta: Yayasan Pustak Obor Indonesia.
- Sukma, R. (2011). Do New Democracies Support Democracy? Indonesia Finds a New Voice. *Journal of Democracy*, 22(4), 110–123.
- Sumarto, M. (2017). Welfare Regime Change in Developing Countries: Evidence from Indonesia.

- Social Policy & Administration*, 51(6), 940–959.
- Sutoro, E. (Ed.). (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Tiller, E. (2017). Mining and Human Rights. In T. O’Callaghan & G. Graetz (Ed.), *Mining in the Asia-Pacific. The Political Economy of the Asia Pacific* (hal. 105–119). Cham: Springer.
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. *Nursing & Health Sciences*, 15(3), 398–405.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320.
- Westermann-Behaylo, M. K., Van Buren, H. J., & Berman, S. L. (2016). Stakeholder Capability Enhancement as a Path to Promote Human Dignity and Cooperative Advantage. *Business Ethics Quarterly*, 26(4), 529–555.
- Yazan, B. (2015). Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake. *The Qualitative Report*, 20(2), 134–152.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Yuda, T. K. (2016). Memaknai ulang corporate social responsibility: Upaya mewujudkan fair responsibility. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 200–217.

Wawancara

- AM. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 2, 2019.
- AR. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 8, 2019.
- BT. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 11, 2019.
- DA. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 10, 2019.
- DI. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 8, 2019.
- EG. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 11, 2019.
- ES. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 10, 2019.
- FU. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 13, 2019.
- HE. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 6, 2019.
- IM. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 10, 2019.
- IR. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 10, 2019.
- IW. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 11, 2019.
- KI. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 4, 2019.
- LF. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 5, 2019.
- LN. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 8, 2019.
- NY. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 10, 2019.
- RA. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 1, 2019.
- RI. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 4, 2019.

- RS. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 9, 2019.
- SN. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 1, 2019.
- SU. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 6, 2019.
- TO. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 2, 2019.
- UL. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 2, 2019.
- WJ. (2019). Andung Biru, Probolinggo, Agustus 2, 2019.